

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Denmark memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia melalui Indonesia–Denmark Energy Partnership Programme (INDODEPP) periode 2020–2024. Kontribusi Denmark terlihat melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari transfer teknologi, penyediaan pelatihan teknis, penyusunan peta energi angin, hingga penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu, Denmark turut berperan dalam mendorong pengembangan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan dan memberikan dukungan pendanaan melalui Investment Fund for Developing Countries (IFU) guna mempercepat implementasi proyek energi bersih. Dengan demikian, INDODEPP berfungsi sebagai instrumen penting dalam memperkuat upaya Indonesia mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sekaligus mendukung komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi kerja sama ini, antara lain tingginya ketergantungan Indonesia pada energi fosil, inkonsistensi kebijakan energi nasional, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan INDODEPP dalam mendukung transisi energi Indonesia memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan konsistensi kebijakan, serta koordinasi yang lebih efektif antaraktor domestik. Meski menghadapi tantangan, program ini tetap memberikan kontribusi nyata terhadap proses dekarbonisasi di Indonesia, yang salah satunya tercermin dalam penghentian operasional PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Dari perspektif teori liberalisme institusional yang dikembangkan oleh Robert Keohane, INDODEPP menggambarkan bagaimana institusi internasional dapat

menjadi sarana yang efektif untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara tanpa memerlukan dominasi hegemonik. Hal ini tercermin melalui mekanisme kerja sama yang transparan, berbasis aturan, dan mengedepankan prinsip manfaat timbal balik, seperti dalam pengembangan PLTB Sidrap yang memadukan teknologi Denmark dengan kebutuhan energi lokal Indonesia. Namun, efektivitas institusi masih dibatasi oleh dinamika politik domestik, terutama dominasi oligarki energi dan lemahnya koordinasi kebijakan.

Sementara itu, melalui perspektif Green Theory yang dikemukakan oleh Dobson dan Lucardie, INDODEPP dapat dilihat sebagai langkah menuju transformasi lingkungan yang lebih berkelanjutan. Program ini telah mendorong pengurangan emisi serta ketergantungan terhadap energi fosil melalui pengembangan energi terbarukan. Akan tetapi, keterbatasan masih terlihat dalam hal partisipasi masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat, yang belum dilibatkan secara optimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun INDODEPP telah mengarah pada transformasi struktural dalam sektor energi, kerja sama tersebut masih perlu memperkuat dimensi keadilan sosial dan ekologis agar benar-benar sejalan dengan prinsip Green Theory.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa INDODEPP merupakan model kerja sama bilateral yang tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia–Denmark, tetapi juga membuka peluang besar untuk mempercepat transisi energi Indonesia. Namun, keberhasilan jangka panjang dari program ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, inklusivitas sosial, serta komitmen kedua negara untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berorientasi pada target kuantitatif, tetapi juga memperhatikan keadilan ekologis dan keberlanjutan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat